

menanggung sebelah menyebelah (wederkereg) terhadap jiwa, atau dengan pemberian uang muka atau kredit kepada anggota-anggotanya. (J.B. Walters, 1954, - 211).

Adapun pengertian koperasi menurut UU No 12 th 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah organisasi rakyat, ekonomi rakyat yang berwatak - sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar keke- luargaan. (Pedoman pelaksanaan kebijaksanaan peng- embangan dan pembinaan koperasi, 1979, 8).

Pengertian koperasi Mino Blambangan adalah merupakan pengertian yang sepesipik dari pengerti- an koperasi yang umum, sebagaimana tercantum da- lam LN th 1949, No 179 dan dalam UUPP No 12 th - 1967.

Pengertian yang spesifik ini ditentukan - dengan kata simpan pinjam dan jual beli kredit pe- ra nelayan. sebagai kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan KUD Mino Blambangan adalah koperasi yang beranggotakan para nelayan dan mempunyai kepen- - tingan langsung dalam lapangan perkreditan. (Wawan- cara dengan Bapak pimpinan KUD Minó Blambangan).

Sistem koperasi yang demikian itu tidak dilarang oleh Islam sebab pada dasarnya semua mu'amalah diperbolehkan oleh syara' selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip pokok mu'amalah. Sehingga boleh mengambil hukum adat (urf) untuk dijadikan dasar pelaksanaannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok peraturan Islam yaitu:

- a. Dilaksanakan dengan suku sama suku
- b. Mengenai sesuatu yang suci dan halal
- c. Tidak ada unsur-unsur penipuan atau merugikan pihak lain serta tidak menulitkan peredaran perekonomian masyarakat.
- d. Untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan syara' (DRS. Masduha A.R.1984, 27).

B. Tinjauan tentang pelaksanaan pinjam meminjam

Pelaksanaan pinjam meminjam dalam koperasi Mino Blambangan yang prosesnya secara luas telah diterangkan bab III, yang secara garis besarnya dapat dikronologikan sebagai berikut:

1. Anggota yang hendak meminjam harus mendaftarkan dulu.
2. Menerima kesepakatan dan peraturan sebagai berikut:
 - peminjam harus menjadi anggota
 - peminjam harus meninggalkan jaminan
 - jika peminjam tidak dapat melunasi dalam jangka -

Apabila jatuh tempo, dimintanyalah kembali modalnya. Jika tidak sanggup mengembalikan modal itu, ditambahnyalah jumlah haknya (modalnya) dan temponya.

Menurut Ibnu Qotadah riba jahiliyah ialah : kelebihan harga barang akibat pembayaran lewat waktu tertentu. Jika batas waktu itu telah tiba, sedangkan hutangnya belum lunas, ditabahnya hutang itu dengan mengundurkan lagi pembayaran. (DR Hanzah Ya'qub, 1984, 172).

Dari pengertian ini maka jelaslah perbedaan antara riba nasiah yang diharamkan dalam utang piutang sebagaimana yang berlaku pada zaman jahiliyah dengan bunga $2\frac{1}{2}\%$ yang berlaku pinjaman meminjam KUD Mino Blambangan Muncar Banyuwangi. perbedaan tersebut adalah:

- a. Ide tambahan atau bunga berasal dari pemilik modal atau yang mempunyai piutang, sedangkan dalam KUD Mino Blambangan tersebut bunga $2\frac{1}{2}\%$ merupakan hasil kesepakatan bersama antara pengurus, pemilik modal dan anggota ketika dalam rapat umum anggota.
- b. Tambahan bunga dalam riba nasiah secara mutlak yang memiliki adalah pemilik modal yang

